

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politik adalah salah satu sendi kehidupan dalam suatu bangsa, hampir tidak ada bangsa yang didunia ini tidak menggunakan sistem politik dalam kehidupan berbangsanya. Sebagai bagian dari sebuah kelembagaan dalam konteks Negara demokratis, partai politik memiliki posisi penting dan peranan yang begitu sentral dalam menghubungkan pandangan-pandangan umum yang timbul dalam masyarakat dengan Pemerintah. Seorang tokoh Politik berpendapat mengenai peranan Partai Politik yang memiliki peran dalam pembentukan corak demokrasi dalam suatu negara, ia menyatakan *Political parties created democracy*.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Fungsi partai politik dibedakan kepada tiga keadaan yang berbeda, yaitu di negara demokratis lebih

---

<sup>1</sup>Ilham Budiawan, *Politilisasi Survei dan Demokrasi*, (Permata Hati: Malang, 2008). hlm. 6.

<sup>2</sup>Sekretaris Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indomesia Tahun 1945*, (Jl. Jend.Gatot Subroto No.6 Jakarta, 2016). hlm. 167.

terbuka bukan otoriter, dan negara berkembang, adapun fungsi partai politik dalam negara demokratis sangat Sentral dan bekerja sebagai layaknya sebuah Partai Politik, pada negara berkembang tujuan dan fungsi Partai Politik hampir serupa dengan negara demokratis, namun ada beberapa permasalahan sosial kemasyarakatan yang menghambat efektifitas kinerjanya, adapun pada negara otoriter partai politik tergantung apakah partai politik tersebut berkuasa atau tidak, apabila partai politik tersebut berkuasa maka secara otomatis dia akan mudah menrealisasikan tujuannya namun berbeda apabila partai tersebut tidak berkuasa maka fungsinya tidak bisa berjalan untuk kepentingan umum, Partai komunis yang berkuasa bertujuan untuk mencapai kekuasaan yang dijadikan batu loncatan untuk menguasai semua Partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis.<sup>3</sup>

Berbicara politik berarti pola membicarakan strategi, prinsip untuk dimencapai kedudukan yang diinginkan, biasa yang di sebut juga kekuasaan.<sup>4</sup> Kekuasaan berarti ada yang menguasai atau memimpin. Berkenaan masalah pemimpin dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa:4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>3</sup>Pita Hitam, *Filsafat Politik sebagai senjata Revolusi*, (Antasari Press:Banjarmasin Timur, 2018). Hlm. 23.

<sup>4</sup>Susilo Pranoto, *Prabowo Macan Asia Harapan Bangsa*, ( Jakarta Selatan:Pala, 2013). hlm.12.

“Hai orang-orang yang beriman taati Allah dan taatilah Rasul(nya), dan Ulul Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Q.S.An-Nissa: 4:59).<sup>5</sup>

Adapun mengenai masalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Simak bin Harb dari Alqamah bin Al Wail Al Hadlrami dari ayahnya dia berkata, "Salamah bin Yazid Al Jafi pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami tapi mereka tidak mau memenuhi hak kami, sikap apa yang anda anjurkan kepada kami, maka beliau berpaling, lalu ditanyakan lagi kepada beliau dan beliauupun tetap enggan menjawabnya hingga dua atau tiga kali pertanyaan itu diajukan kepada beliau, kemudian Al- Atyats bin Qais menarik Salamah bin Zayid. Beliau lalu bersabda: "Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan mempertanggung jawabkan atas semua perbuatan mereka sebagaimana kalian juga akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kalian." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syubah dari simak dengan sanad seperti ini, ia mengatakan, "Lalu Al Asyats bin Qais menarik Usamah bin Zayid, lantas beliau menjawab: "Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka sebagaimana kalian juga akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kalian". (H.R. Muslim: 3433).<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Pengadaan Kita Suci Alqur'an, 2008). hlm. 128.

<sup>6</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2012). hlm. 545.

Hadis di atas setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan pemimpin bagi umat manusia adalah pemimpin dan ada dipertanggungjawabkan dari setiap pemimpin itu kepada Allah SWT. Jika berbicara tentang pemimpin tidak terlepas dari masalah Politik. Dalam arah atau perkembangan politik, maka tentunya ada Pemikiran-Pemikiran ide-ide atau gagasan tentang politik suatu bangsa. Oleh karena itu politik dan kepemimpinan bagaikan satu pinang dibelah dua tidak terpisahkan.<sup>7</sup>

Kalimantan Selatan ada seorang tokoh sentral yang sangat berpengaruh pada masanya dalam mewarnai dunia perpolitik di Kalimantan Selatan. Beliau ialah H. Ma'wah Masykur mantan Ketua DPRD. Sejak beliau terjun didunia politik H. Ma'wah Masykur tentu tidak diragukan lagi selain beliau menjadi Ketua DPRD Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya Haruyan selama 10 Tahun sama dengan periode 1956-1966<sup>8</sup>. Kemudian beliau 40 Tahun Legislatif, mulai dari DPRD GR di Hulu Sungai Tengah (HST) hingga DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) hal merupakan fakta yang tidak pernah terbantahkan.<sup>9</sup>

Tokoh H. Ma'Wah Maskur di Kalimantan Selatan berapa Tahun silam tentu menjadi teladan oleh banyak politisi di Kalimantan Selatan, utamanya kader-kader PPP. H. Ma'wah Masykur dalam dunia birokrasi beliau juga menjadi rujukan , bagi pemimpin atau kepala daerah yang ada di Kalimantan Selatan seperti Gubernur dan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 79.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>9</sup>Nurhudianto Munawar Khalil, *Politisi Teruji Oleh Waktu*, (Qalam Borneo, 2008). hlm. 18.

wali kota serta anggota DPRD setelah beliau.<sup>10</sup> Ide atau Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur dalam politik praktis salah satunya pemikiran cermerlang dalam memperkuat posisi beliau sebagai pimpinan atau fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetap kokoh menjadi pemimpin nomor dua di Kalimantan Selatan. Kemudian Pemikiran Politik beliau agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap eksis sampai Sekarang.<sup>11</sup>

Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur beliau tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Politisi Yang Teruji Oleh Waktu. Dalam beberapa kesempatan beliau sampaikan Pemikiran-Pemikiran beliau itu kepada Kader-kader di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengenai strategi untuk memenangkan suatu pertarungan Politik. Saat ini H. Ma'wah Masykur ialah seorang sepuh di Kalimantan Selatan, nasehat dan Pemikiran Politiknya menjadi rujukan bagi Politisi-Politisi muda di Kalimantan Selatan. Bahkan tidak terbatas bagi kader-kader Partai Persatuan Pembangunan saja, semua generasi muda yang ingin bertukar pandangan dan berdiskusi dengan beliau tentang politik diterima dengan baik. Salah satu ialah ketika Ibnu Sina sebelum mencalonkan walikota Banjarmasin dengan petunjuk dan saran beliau ternyata berhasil. Masih banyak lagi generasi muda yang berhasil dengan cara politik beliau.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nurdianto Munawar Khalil, *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>11</sup>Nurdianto Munawar Khalil, *Ibid*, hlm. 14.

<sup>12</sup>Nurhudianto Munawar Khalil, *Ibid*, hlm.75.

Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur dalam politik semenjak Orde Baru berkuasa, menampilkan sisi kepahitan yang manis sebagai sebuah pembelajaran. Berjuang di Partai politik tetapi tidak disokong oleh kekuasaan seperti pekerjaan menegakan benang basah, rintangan dan risiko yang berat menjadi penghalang. Namun H. Ma'wah Masykur niatnya untuk membela membela panji-panji Islam melalui partai NU PPP, dan menarapkan kebijakan politik sesuai syarat Islam. Jadi Pemikiran H. Ma'wah Masykur sangat cocok sebagai mediator dalam gejolak perbedaan politik pada saat itu, beliau bukan hanya tokoh politik akan tetapi seorang pemimpin bangsa di Kalimantan Selatan yang mampu menghimpun beberapa fraksi berbagai partai sehingga pemikiran beliau patut ditiru oleh setiap anggota DPR, DPRD maupun pejabat lainnya<sup>13</sup>. Beliau juga selama bertugas tidak pernah melalaikan absen, beliau selalu mengayomi dan sangat demokratis.<sup>14</sup> Olehkarena itu hal ini perlu dikaji dan dijadikan bahan skripsi untuk menyelesaikan semester akhir PPP saat kepemimpinan H. Ma'wah Masykur tidak lain bukan bergerak bidang keislaman baik segi perilaku maupun dalam sistem asas Islam dalam Politik sehingga beliau selama sekali berkuasa kurang lebih 50 mengabdikan di partai politik yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi, perbedaan PPP dulu tujuannya hanya mendirikan Panji- Panji Islam yang mana perlu dianut oleh politisi kaum muda maupun tua bahkan saat itu PPP Partai yang paling di segani oleh beberapa fraksi lebih khusus di Kalimantan Selatan.

---

<sup>13</sup>Nurhudianto Munawar Khalil, *Ibid*, hlm. 28.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 143-145.

Sedangkan PPP Sekarang ini terlalu mencari pamor diri atau bisa di katakan mengutamakan memanfaatkan pribadi saja, akan tetapi PPP sekarang tidak lagi mengutamakan rakyat akan tetapi lebih pro golongan tertentu. Maka dari itu kedua PPP dari dulu hingga sekarang sangat jauh berbeda padahal tetap saja PPP tersebut partai lambang Ka'bah/Partai Persatuan Pembangunan pada inti orang Islam, hasil produk dalam sistem partai tentuk unsur-unsur harmonisasi Islamiyah.<sup>15</sup>

PPP dulu selalu pro rakyat baik dalam peraturan pada saat rapat paripurna, bahkan di era Orde Baru hanya PPP yang berani kritisi pemerintah dalam kegoncangan sistem Pemerintahan. PPP dulu memang beda pada sekarang ini, PPP dulu pro kebijakan untuk kemaslahatan umat, mendirikan Panji-Panji Islam, memberikan konstribusi bagi masyarat lebih khusus bangsa dan negara.<sup>16</sup>

Membandingkan secara umum antara partai politik persatuan pembangunan dulu dan Partai Persatuan Pembangunan sekarang ini baik dari sumbangsi untuk Kalimantan, kebijakan, teladan, dan pro masyarakat tentu nihilesme apalagi membela Panji-Panji Islam dan juga H. Ma'wah Masykur ini tokoh politik PPP dulu totalitas membela Panji Islam, perlu ditelusuri Partai PPP sekarang ini kemana saja tidak ada tindakan yang pro sama masyarakat, kebjikan yang membela Panji Islam dan PPP sekarang ini lebih menunjukkan pamor masing-masing sehingga timbul akibatnya berbagai macam cara dihalalkan untuk bisa mencicipinya. Kekuasaan yang sejatinya

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 148-149.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 159.

adalah amanah dan beban yang berat justru menjadi bahan perebutan bak makanan yang paling lezat.<sup>17</sup>

H. Ma'wah Masykur adalah salah seorang tokoh Politik yang sudah sampai pada level terbaik bagi pendapat masyarakat. Beliau sangat konsisten mengikuti Panji-Panji Islam sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu partai lain. Hal ini tampak pada karyanya Politisi yang teuji oleh waktu. Kesibukannya untuk bangsa dan Negara berhasil mengkader Calon Politisi-Politisi yang sukses mengantarkannya pada jabatan gubernur, walikota, DPRD, DPR dan pejabat penting lainnya pada Tahun 1965. Bahkan, melalui organisasi-organisasi itu juga H. Ma'wah Masykur mampu tampil sebagai pemimin pada zamannya.<sup>18</sup>

Gaya kepemimpinannya sangat berwibawa dan tegas. Beliau berkata dan maknanya juga sangat jelas. Susunan kata dan redaksinya pun begitu serasi dapat diterima oleh orang banyak. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal dengan akhlakunya yang tinggi dan mempunyai rekam jejak pergaulan yang bersih. Dengan karunia umur yang panjang hingga 84 Tahun, wafat Tahun 2013 di Lamongan Jawa Timur sekaligus dimakamkan, ditengah berbagai kesibukannya, beliau termasuk ulama yang mewariskan khazanah keilmuan yang luar biasa kepada umat Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 120.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 46-47.



Gagasan dan pemikirannya politik yang dituangkan dalam bukunya Nurhudianto Munawar Khalil yang amat fenomenal berjudul, *Politisi Yang Teruji Oleh Waktu*, hingga kini masih tetap diperbincangkan. Selain menguasai ilmu politik, intelektual muslim bernama H. Ma'wah Masykur ini juga dikenal sebagai ahli politik, mediator, serta tokoh NU terkemuka. Ia sempat mengabdikan dirinya menjadi pengasuh pondok pasentren. Kelihatannya dalam melakukan lobi-lobi politik juga membuat tokoh politisi oposisi menggunakan strateginya.<sup>20</sup>

Ketika situasi politik kenegaraan bergolak, H. Ma'wah Masykur tampil sebagai tokoh pemersatu. Sebagai seorang pemikir yang independen, H. Ma'wah Masykur terus menyuarakan mediasi antara dua kekuatan yang bertikai pada zamannya, yakni pada saat rapat paripurna DPRD di Kalimantan Selatan. Ia tak memihak pada satu kubu, melainkan tampil sebagai tokoh yang netral. Tak salah, jika seorang orientalis menyebut tokoh ulama sekaligus politisi.<sup>21</sup>

Buku ini bisa dikatakan sebagai referensi awal karena ini merupakan salah satu buku paling awal yang membahas biografi politik. Dikatakan autentik karena buku ini sekaligus menjadi dokumen autentik untuk menjawab keraguan orang yang selama ini menuduh bahwa politik tidak ada bemanfaat, banyak janji palsu, dan tuduhan-tuduhan menyimpang lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 134.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 136-144.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 51.

Partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 1 (1) adalah:

Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, menjalankan aspirasi masyarakat yang adil dan amanah<sup>23</sup>. Adapun tugas partai politik (1). Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat Pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil menentukan keputusan politik, (2). Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas, (3). Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan masyarakat umum.<sup>24</sup>

H. Ma'wah Masykur dalam Partai Politik hal tidak pernah terbantahkan yakni, Ketua PD Partai NU Kab. HST pada Tahun 1960-1970, Ketua Koordinator Partai Persatuan Pembangunan Tahun Kab. HST pada Tahun 1970-1976, wakil Ketua DPW Kalimantan Selatan pada Tahun 1976 -1978, Wakil Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan 1978-1984, Wakil Ketua DPW Partai Politik Pembangunan (PPP) Kalimantan

---

<sup>23</sup>[https://www.academia.edu//makalah tentang ilmu politik](https://www.academia.edu//makalah_tentang_ilmu_politik), diakses pada tanggal 24 Desember 2019, jam 17.00 wita.

<sup>24</sup>*Ibid*

Selatan pada Tahun 1984-1997, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PPP Kalsel, Wakil Ketua Pimpinan harian wilayah PPP Kalsel.<sup>25</sup>

H. Ma'wah Masykur pengalaman pekerjaan non parlemen yaitu, sekretaris yayasan (Pembentuk Budi) Haruyan Kab. HST pada Tahun 1956-1966, Guru Agama Honorer Pemerintah di beberapa Madrasah di Kab. HST pada 1967, PNS guru pada Tahun 1967, komisaris PT Kalimantan Konstruksi Kalimantan Selatan.<sup>26</sup>

H. Ma'wah Masykur memang pengabdian parlemen luar biasa di Kalimantan Selatan selama 50 tahun yakni, Ketua DPRD GR Kab. HST pada Tahun 1967-1971, Anggota DPRD Kab. HST pada Tahun 197-1977, anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1977-1982, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1982-1987, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1987-1992, Calon Anggota DPR RI pada Tahun 1992- 1997, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1997-2004, dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan pada Tahun 2004-2009.<sup>27</sup>

Sepanjang Tahun 1960 hingga 2009 tercatat PPP selalu berkuasa bahkan paling banyak menduduki kursi DPRD, PPP memang yang paling berpengaruh pada zamanya, visi dan misi memperjuangkan Panji-Panji Islam berasaskan Prinsip Musyawarah, Prinsip Persatuan dan Persamaan, Prinsip Keadilan dan Kejujuran, Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Prinsip *Istiqamah*, dan yang terakhir Prinsip

---

<sup>25</sup>Nurhudianto Munawar Khalil, *Politisi Teruji Oleh Waktu*, (Qalam Borneo: Kalimantan Selatan, 2008), hlm. 151.

<sup>26</sup>Nurhudianto, *Ibid*, hlm. 152.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 153-154.

Ibadah<sup>28</sup> dan memperjuangkan aspirasi sehingga rakyat mencintai pemimpin oleh karena itu PPP dulu lebih mengerakkan kegiatan sosial yang dilaksanakan setiap minggu di Haruan pondok pasentren, pembangunan tempat pendidikan Madrasah Tsanawiyah, berupa bantuan kemakmuran bagi masyarakat yang membutuhkan, bidang keagamaan pembangunan pondok pasentren dan berkumpul NU juga di bangun, PPP dulu lebih mengedepan nasib masyarakat umum dan pro rakyat dalam kebijakan yang berhubungan kemasyarakatan.<sup>29</sup>

Jika dibandingkan PPP sekarang ini lebih menunjukkan bahwa Birokrasi pada kondisi tertentu tidak lagi tunduk pada pimpinan jika merasa kepentingannya terganggu (cenderung pragmatis). Yang menarik, seakan tidak ingin mengalami pengkhianatan kepada masyarakat yang sama oleh para Birokrat, walikota Banjarmasin saat ini membuat sebuah kebijakan unik dimana PNS Kota Banjarmasin wajib mengisi Surat Kesetiaan. Adapun isi surat tersebut berupa surat pernyataan yang berisi 12 (dua belas ) poin yang wajib diisi serta dilengkapi materai 6.000, beberapa poin yang tercantum di dalamnya antara lain menyatakan setia dan menaati semua ketentuan yang berlaku selama masa kepemimpinan walikota tersebut. Selain itu, mereka harus bersedia melepas jabatan jika dianggap tidak melakukan tugas dengan yang semestinya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ketetapan Mukhtar PPP No:07 Tap/Mukhtar VII/PPP/2006.

<sup>29</sup>Nurhudianto Munawar Khalil, *Politisi Teruji Oleh Waktu*, (Qalam Borneo: Kalimantan Selatan, 2008), hlm. 47.

<sup>30</sup><http://www.mediaindonesia.com/read//PNS-Kota-Banjarmasin-Wajib-Isi-Surat-Kesetiaan> wawancara dengan Samhuddin, diakses pada tanggal 24 desember 2019, jam 13.30 wita.

Masyarakat berjanji untuk tidak memberikan informasi, melaporkan rahasia pemerintah dan pimpinan pada siapapun, kecuali pada walikota dan wakilnya. Mereka harus bersedia diberhentikan jika melanggar ketentuan. Adanya surat kesetiaan ini dinilai wajar oleh kepala bagian humas Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dinilai memiliki unsur Politis. Hal seperti ini yang merupakan hal yang unik jika tidak mau di katakan aneh. PNS sejatinya memiliki kode etiknya sendiri yang telah diikrarkan ketika pengambilan sumpah dilakukan. Kode etiknya meliputi kesetiaan terhadap negara, sesuatu yang jauh lebih besar dibanding sekedar kesetiaan terhadap pemimpin daerah yang masa jabatannya terbatas. Karena itu besar sekali kemungkinannya jika surat kesetiaan ini sangat terkait dengan kepentingan Politik walikota dan wakil walikota Banjarmasin.<sup>31</sup>

Identitas keislaman mempengaruhi preferensi Politik mereka yang secara baik dimanfaatkan oleh Partai pada saat pileg maupun pilkada baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Secara Umum, Partai yang menjadi pemenang dalam setiap pileg memang bukanlah Partai Islam, tetapi isu moral (dimana menjadi bagian dari agama) sangat berlaku diwilayah Kalimantan Selatan.<sup>32</sup> Kalimantan Selatan identitas keislaman terbesar dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dengan program

---

[\[http://www.jatam.org/index2.php?option=com\\\_content&do-pdf-1&id-657\]\(http://www.jatam.org/index2.php?option=com\_content&do-pdf-1&id-657\) diakses pada tanggal 23 Maret 2019. pukul 23:12 wita.](http://www //Wawancara dengan Taufik ArbaŌin, diakses pada tanggal 26 Desember 2019, jam 8:00wita.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>32</sup>Dwitho Frasetyandi, *Potret Buruk Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Nirwana Media, 2008). hlm. 10.

kampanye yang cukup populis bagi orang Islam, yaitu pemugaran dan penambahan fasilitas masjid serta sumbangan pada perayaan hari besar Islam, Kelompok pengajian yang tumbuh subur di masyarakat juga kerap di manfaatkan sebagai ajang penjaringan suara di masa-masa pilkada. Tuan guru setiap kelompok pengajian bisa menjadi sasaran Politik, bukan sebuah hal biasa lagi, bahwa kampanye-kampanye pemilihan kepala daerah banyak dibiayai oleh pengusaha. Sebagaimana peneliti ungkapkan sebelumnya umumnya para pengusaha ini mencari kemudahan bisnis dimasa yang akan datang dengan mendukung salah satu calon yang kira-kira potensial untuk menang. Secara lebih spesifik, kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mendapatkan proyek, proses Birokrasi dan Regulasi Pasca Pilkada, tonomi daerah seharusnya menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan Publik terhadap masyarakat sekaligus menjadi akselerator proses demokratisasi di daerah masyarakat sendiri gagap dalam merespon perubahan, sehingga fungsi *checks and balances* yang seharusnya dilakukan tidak bisa berjalan optimal.<sup>33</sup>

Masalah Politik adalah hal yang penting dalam suatu Pemerintahan yang harus diselesaikan oleh karena itu merekalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan Publik bagi masyarakat. Jika masalah ini akan terulang setiap Tahun maka

---

<sup>33</sup><http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/13/217668/127/101/PNS-Kota-Banjarmasin-Wajib-Isi-Surat-Kesetiaan,diakses> pada tanggal 13 Nopember 2019, jam 10.30 wita.

akan berdampak pada semangat kerja yang menurun sehingga pelayanan Publik bagi masyarakat menjadi kurang optimal.<sup>34</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pemikiran tersebut. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PEMIKIRAN POLITIK H. MA’WAH MASYKUR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

Bagaimana Pemikiran Politik H. Ma’wah Masykur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yakni:

Untuk mengetahui Pemikiran Politik H. Ma’wah Masykur.

---

<sup>34</sup>Ibid

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan menambah wawasan dibidang ilmu politik lebih khusus bagi Politisi yang ada di Kalimantan Selatan.
2. Sebagai sumbangan Pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya.
4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Sebagai bahan perbandingan bagi Peneliti dimasa akan datang ingin mengkaji Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur dan memperdalam hal ini lebih jauh lagi.
6. Bahan kajian untuk mengembangkan ilmu Politik ini dapat menghasilkan megimplementasikan dalam dunia Politik bagi Kalimantan Selatan dan lebih khusus Masyarakat Umum.



## E. Definisi Operasional

Agar menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Pemikiran adalah proses, perbuatan, cara memikir.<sup>35</sup> Pemikiran merupakan hasil berpikir (memikir). Sementara politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau dasar-dasar pemerintah.<sup>36</sup> Pemikiran Politik yang penulis dijelaskan ialah ide-ide pokok atau gagasan yang cermerlang dengan masalah Politik yang dicetuskan oleh H. Ma'wah Masykur.

## F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat Tentang Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur. Tujuan peneliti membahas Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur. Hal ini di anggap perlu yang mana hasil Pemikiran beliau perlu dipelajari dan dikaji bagi yang membuat judul skripsi nanti bisa dibaca oleh setiap orang lebih khusus mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penulis lebih kepada Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur. Tujuan penulis

---

<sup>35</sup>Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta:Pustaka Press,1999), hlm. 768.

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indobesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Hlm. 1 683.

menjelaskan sesuai dengan hasil Pemikiran tokoh tersebut. Namun bererapa penelitian lain mengambil tokoh Politik agak mirip, dengan tokoh yang berbeda, yaitu:

1. Untuk tokoh Politik dalam Negeri yang sudah diteliti pada zaman dahulu antaranya Pemikiran Politik Muhammad Natsir, Pemikiran Politik Buya Hamka, Pemikiran Politik Ami Rais, dan Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid.
2. Untuk Ulama tokoh Politik yang sudah di ambil mahasiswa terdahulu diantaranya, yaitu Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Pemikiran politik Hasan AL-Banna, Pemikiran Politik Sayying Quthb dan Pemikiran Politik Yusuf Qaradhawi.
3. Pemikiran Politik Ir. H. Muhammad Said oleh Muhammad Supryadi (0601137298). Adapun penelitian terdahulu subyeknya berorientasi Pemikiran politik Ir.H.Muhammad Said sementara penelitian dan penulis memfokuskan Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur, tentu berbeda yang diteliti sekarang ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Keperpustakaan, yakni dengan mengkaji beberapa literature-literatur, kitab/buku, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Sedangkan jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, Sedangkan jenis penelitian

ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni peneliti dapatkan dari berbagai perpustakaan.<sup>37</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digali mengenai Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur dalam Kekuasaan legislatif analisis buku Poltisi Yang Teruji Oleh Waktu karya Nurhudianto Munawar Khalil, adapun sumber bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier:

- a. Bahan data primer adalah semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian secara normatif. Adapun yang menjadi rujukan adalah rekan tokoh dan keluarga.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau kitab lain. Data ini sebagai pendukung atau pelengkap dari bahan data primer.<sup>12</sup>
  - 1) Buku *Politik* (memahami politikk Islam secara tekstual dan konstekstual) Karya Farid Nu'man Hasan;
  - 2) Buku *fikih Politik* karya Ustadz Mohammad Toha Anwar. Lc;
- c. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan

---

<sup>37</sup>Bachtiar, *Konsep Pembuatan Skripsi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 13.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.112.

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang merupakan subyek penelitian, ditambah dengan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bentuk atau sifat dari penelitian.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur atau buku-buku yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub judul yang membahas mengenai permasalahan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Untuk mengolah data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik deskriptif kualitatif sehingga tersusun sistematis dan mudah dipahami.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari empat BAB yang di susun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan. BAB ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur. Kemudian di rumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori, pada bagian BAB ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai tentang Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur.

BAB III. Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang di gunakan untuk menggali data Penelitian Perpustakaan (*library research*) yang di perlukan, Riwayat hidup H. Ma'wah Masykur, Analisis Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur, Faktor Penghalang H. Ma'wah Masykur dalam Politik.

BAB IV. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.